

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPPK (STUDI PADA GURU SMAN DI KABUPATEN KARIMUN)

Oleh:

**Ranti Marshanda Sintiana
Nim: 2205020106**

ABSTRAK

Implementasi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam penataan tenaga guru masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya di daerah kepulauan seperti Kabupaten Karimun, yang ditandai dengan keterbatasan akses informasi, ketidaksesuaian distribusi tenaga pendidik, serta perbedaan antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dengan kondisi di lapangan. Meskipun demikian, kebijakan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme serta memberikan kepastian status bagi guru. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kebijakan yang adaptif, didukung oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta koordinasi birokrasi yang baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang meliputi empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagai alat analisis dalam memahami fenomena yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder yang berfokus pada implementasi kebijakan PPPK pada guru SMA di Kabupaten Karimun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPPK secara umum telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif dalam penataan tenaga pendidik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kejelasan informasi pada tahap awal, distribusi guru yang belum merata, keterbatasan akibat kondisi geografis, serta kompleksitas koordinasi antar lembaga. Selain itu, masih ditemukan kebutuhan peningkatan sosialisasi dan pemahaman terkait prosedur administrasi kebijakan PPPK agar implementasinya lebih efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, pemerataan distribusi guru, penguatan sosialisasi kebijakan, serta penyesuaian implementasi kebijakan dengan kondisi daerah agar pelaksanaan kebijakan PPPK dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Kata kunci: implementasi kebijakan, PPPK, guru, pendidikan, Kabupaten Karimun.

Analysis of the Implementation of the PPPK Policy (A Study on Senior High School Teachers in Karimun Regency)

By:

Ranti Marshanda Sintiana

Nim: 2205020106

ABSTRACT

The implementation of the Government Employees with Work Agreements (PPPK) policy for teachers still faces several challenges, especially in archipelagic areas such as Karimun Regency. These challenges include limited access to information, uneven distribution of teachers, and differences between policies made by the central government and conditions in the field. However, this policy has an important role in improving teacher professionalism and providing clearer employment status for teachers. Therefore, the implementation of the policy requires effective communication, adequate resources, and good bureaucratic coordination so that the policy objectives can be achieved properly. This study uses the policy implementation theory of George C. Edward III, which consists of four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research uses a qualitative approach with a descriptive method. The data used in this study consist of primary and secondary data related to the implementation of the PPPK policy for senior high school teachers in Karimun Regency. The results of the study show that the implementation of the PPPK policy has generally run quite well and has given positive impacts on the management of teaching staff. The policy helps schools fulfill teacher needs and provides employment status certainty for honorary teachers. However, several obstacles are still found in its implementation, such as unclear information at the early stage of the policy, uneven teacher distribution, geographical limitations in archipelagic areas, and coordination difficulties among institutions. In addition, better policy socialization and understanding of administrative procedures are still needed so that the implementation of the PPPK policy can run more effectively and appropriately. Therefore, stronger coordination, equal distribution of teachers, and adjustments to regional conditions are needed to improve the implementation of the policy.

Keywords: policy implementation, PPPK, teachers, education, Karimun Regency.